

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menyatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan dari pelaporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Badan Keuangan Daerah Kota Depok selaku pengemban amanah masyarakat Kota Depok melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. LKIP dimaksud memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah serta akuntabilitas keuangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

Capaian kinerja Badan Keuangan Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi dijelaskan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. **Bahwa dokumen LKIP ini didasarkan pada Renstra sebelum revisi, sehingga pembahasan atas akuntabilitas kinerja didasarkan pada Renstra tersebut, sedangkan Renstra setelah revisi akan digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja Tahun 2019.** Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

### 3.1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, Badan Keuangan Daerah telah menetapkan 8 sasaran strategis dengan 14 indikator sasaran yang akan dicapai pada kurun waktu tahun 2018. Setelah Tahun Anggaran 2018 berakhir, capaian kinerja dari sasaran tersebut diukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalannya dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2018. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Misi 1 : Membangun dan Mengembangkan BKD menjadi Lembaga yang Profesional</b>					
1.	Meningkatnya standar pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan pajak daerah	A	B	50%
2.	Meningkatnya kualitas manajemen BKD	Predikat SAKIP BKD	B	B	100%
<b>Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara Optimal</b>					
1.	Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan secara berkelanjutan	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	36,59 %	36,06 %	98,55 %
		Persentase rata-rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9,84 %	-12,42 %	79 %
		Persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target pada tahun berjalan	100%	105,25 %	105,25 %
<b>Misi 3 : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel</b>					
1.	Meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan APBD	Alokasi anggaran belanja modal terhadap total belanja APBD	39,50%	26,13%	66,15%
2	Meningkatnya disiplin waktu penyusunan dan pelaksanaan APBD	Tersusunnya APBD secara tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100%

3.	Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah	Terlayannya pelayanan perbendaharaan	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya tata kelola aset	Persentase aset tercatat	100%	100%	100%
		Persentase bidang tanah pemerintah bersertifikat	8,00%	9,3 %	116,25 %
		Jumlah bidang yang dimanfaatkan	30 bidang	60 bidang	200 %
		Jumlah luas RTH yang diamankan per tahun	1,5 Ha	2,5 Ha	166,67 %
5.	Meningkatnya disiplin waktu penyusunan laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %
		Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Kota Depok	WTP	WTP	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada tahun 2018 terealisasi 100%, 1 (satu) sasaran realisasinya melampaui 100%, sedangkan 2 (dua) sasaran tidak mencapai 100% yaitu sasaran Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan secara berkelanjutan serta sasaran Meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan APBD.

### **3.2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR**

Perbandingan data realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu yang ditampilkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah perbandingan data realisasi kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 mengingat Badan Keuangan Daerah baru terbentuk pada Tahun 2017. Adapun perbandingan realisasi kinerja tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017 DENGAN 2018**

No.	SASARAN STRATEGIS		SATUAN	TARGET		REALISASI		% Capaian	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		2017	2018	2017	2018	2017	2018
<b>MISI 1 : Membangun dan Mengembangkan BKD Menjadi Lembaga Yang Profesional</b>									
1.	Meningkatnya standar pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan pajak daerah	Nilai	A	A	A	B	100	50
2	Meningkatnya kualitas manajemen BKD	Predikat SAKIP BKD	Nilai	B	B	B	B	100	100
<b>MISI 2. Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara Optimal</b>									
1	Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan secara berkelanjutan	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persen	36,10	36,59	42,52	36,06	117,78	98,55
		Persentase rata-rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	20,48	9,84	31,28	-12,42	152,73	79,00
		Persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target pada tahun berjalan	Persen	100	100	112,29	105,25	112,29	105,25
<b>MISI 3 : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel</b>									
1	Meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan APBD	Alokasi anggaran belanja modal terhadap total belanja APBD	Persen	39,50	39,50	29,96	26,13	75,85	66,15
2	Meningkatnya disiplin waktu penyusunan dan pelaksanaan APBD	Tersusunnya APBD secara tepat waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	100
3.	Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah	Terlayaninya pelayanan perbendaharaan	Persen	100	100	100	100	100	100

No.	SASARAN STRATEGIS		SATUAN	TARGET		REALISASI		% Capaian	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		2017	2018	2017	2018	2017	2018
4.	Meningkatnya tata kelola aset	Persentase aset tercatat	Persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase bidang tanah pemerintah bersertifikat	Persen	7,71	8	9,14	9,3	118,55	116,25
		Jumlah bidang yang dimanfaatkan	Bidang	30	30	51	60	170,00	200
		Jumlah luas RTH yang diamankan per tahun	Ha	1,5	1,5	1,7	2,5	113,33	166,667
5.	Meningkatnya disiplin waktu penyusunan laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	100
		Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Kota Depok	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100

Dari tabel di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

➤ **MISI 1 : Membangun dan Mengembangkan BKD menjadi Lembaga yang Profesional**

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Standar Pelayanan Publik**

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan pajak daerah. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,05; dari **87,69** pada tahun 2017 menjadi **87,74**. Namun untuk kategori mutu pelayanan mengalami penurunan dari A (Sangat Baik) menjadi B (Baik). Hal ini disebabkan adanya perubahan metodologi dasar penilaian yaitu :

a. **Dasar Peraturan.** Tahun 2017 penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, Sedangkan pada Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

b. **Skala Nilai IKM**

Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 - 43,75	D	Tidak Baik
43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
62,51 - 81,25	B	Baik
81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

### **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Manajemen BKD**

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah predikat SAKIP BKD. Pada tahun 2017 nilai SAKIP adalah B, dan pada tahun 2018 nilai SAKIP BKD tetap pada posisi B atau dengan kategori baik.

### ➤ **Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara Optimal**

#### **Sasaran Strategis 1 : Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Peningkatan secara Berkelanjutan**

Indikator kinerja pertama pada sasaran ini yaitu persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah. Pada tahun 2017 terealisasi 36,59 % dengan capaian kinerja 117,78 % dan pada tahun 2018 terdapat penurunan menjadi 36,06 % dengan capaian kinerja 98,55 %.

Indikator kinerja kedua pada sasaran ini ialah persentase rata-rata kenaikan pendapatan asli daerah (PAD). Pada tahun 2017 memperoleh capaian kinerja sebesar 152,73 %, sedangkan pada tahun 2018 turun secara signifikan hanya memperoleh capaian kinerja sebesar 79 %.

Indikator kinerja ketiga pada sasaran ini ialah persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan target pada tahun berjalan. Pada tahun 2017 realisasinya adalah 112,29 % melebihi target 100%. Pada tahun 2018 realisasinya turun menjadi 105,25 % melebihi target 100%.

Penurunan ketiga indikator ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan Permendagri ini menyebabkan Retribusi IMB dan HO tidak lagi menjadi beban dalam target pendapatan.

➤ **Misi 3 : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel**

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Efektifitas dalam Pengelolaan APBD**

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah alokasi anggaran belanja modal terhadap total belanja APBD. Tahun 2017 memperoleh capaian kinerja 75,85%, sedangkan tahun 2018 memperoleh capaian kinerja sebesar 66,15 % atau tidak mencapai target. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan dikarenakan adanya peningkatan proporsi belanja barang dan jasa serta belanja tidak langsung sementara jumlah belanja modal tidak bertambah.

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Disiplin Waktu Penyusunan dan Pelaksanaan APBD**

Sasaran strategis ini dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 memperoleh capaian kinerja Tepat Waktu dalam penyusunan APBD secara terus menerus sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Profesionalitas, Transparansi dan Akuntabilitas Penatausahaan Keuangan Daerah**

Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah terlayannya pelayanan perbendaharaan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 memperoleh capaian kinerja 100 % secara terus menerus sesuai dengan target yang ditetapkan.

**Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Tata Kelola Aset**

Indikator kinerja pertama pada sasaran ini yaitu persentase aset tercatat. Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 memperoleh capaian kinerja 100 % secara terus menerus sesuai dengan target yang ditetapkan.

Indikator kinerja kedua pada sasaran ini ialah persentase bidang tanah pemerintah bersertifikat. Pada tahun 2017 memperoleh capaian kinerja sebesar 118,55 %, sedangkan pada tahun 2018 tercapai 116,25 %. Terjadi penurunan antara tahun 2017 dengan tahun 2018.

Indikator kinerja ketiga pada sasaran ini ialah jumlah bidang yang dimanfaatkan. Pada tahun 2017 tercapai 100 % atau 51 bidang, sedangkan pada tahun 2018 tercapai 200 % atau 60 bidang, hal ini menunjukkan adanya peningkatan.

Indikator kinerja keempat pada sasaran ini adalah jumlah luas RTH yang diamankan per tahun. Pada Tahun 2017 memperoleh capaian kinerja 133,33 %. Dan pada Tahun 2018 mengalami kenaikan capaian menjadi 166,67 %.

#### **Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Disiplin Waktu Penyusunan Laporan Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan**

Indikator kinerja pertama pada sasaran ini yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 memperoleh capaian kinerja Tepat Waktu secara terus menerus sesuai dengan target yang ditetapkan.

Indikator kinerja kedua pada sasaran ini ialah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok. Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 memperoleh capaian kinerja WTP secara terus menerus sesuai dengan target yang ditetapkan.

### **3.3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI**

Perbandingan realisasi kinerja Badan Keuangan Daerah sampai dengan Tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut:



**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH**

No.	SASARAN STRATEGIS		SATUAN	Target Sampai dengan Tahun 2018 (Sesuai Target Renstra)	Realisasi Sampai dengan Tahun 2018	Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan Tahun 2018 (%)	KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA					
<b>MISI 1 : Membangun dan Mengembangkan BKD Menjadi Lembaga Yang Profesional</b>							
1.	Meningkatnya standar pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan pajak daerah	Nilai	A	B	50,00	Bersifat non kumulatif
2.	Meningkatnya kualitas manajemen BKD	Predikat SAKIP BKD	Nilai	B	B	100,00	Bersifat non kumulatif
<b>MISI 2 : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara Optimal</b>							
1.	Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan secara berkelanjutan	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persen	36,59	36,06	98,55	Bersifat non kumulatif
		Persentase rata-rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	9,84	-12,42	79,00	Bersifat non kumulatif
		Persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target pada tahun berjalan	Persen	100,00	105,25	105,25	Bersifat non kumulatif
<b>MISI 3 : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel</b>							
1.	Meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan APBD	Alokasi anggaran belanja modal terhadap total belanja APBD	Persen	39,50	26,13	66,15	Bersifat non kumulatif
2.	Meningkatnya disiplin waktu penyusunan dan pelaksanaan APBD	Tersusunnya APBD secara tepat waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00	Bersifat non kumulatif

No.	SASARAN STRATEGIS		SATUAN	Target Sampai dengan Tahun 2018 (Sesuai Target Renstra)	Realisasi Sampai dengan Tahun 2018	Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan Tahun 2018 (%)	KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA					
3.	Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah	Terlayannya pelayanan perbendaharaan	Persen	100	100	100,00	Bersifat non kumulatif
4.	Meningkatnya tata kelola aset	Persentase aset tercatat	Persen	100	100	100,00	Bersifat non kumulatif
		Persentase bidang tanah pemerintah bersertifikat	Persen	8	9,3	116,25	Bersifat non kumulatif
		Jumlah bidang yang dimanfaatkan	Bidang	30	60	200,00	Bersifat non kumulatif
		Jumlah luas RTH yang diamankan per tahun	Ha	1,5	2,5	166,67	Bersifat non kumulatif
5.	Meningkatnya disiplin waktu penyusunan laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00	Bersifat non kumulatif
		Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Kota Depok	Opini	WTP	WTP	100,00	Bersifat non kumulatif

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sampai dengan Tahun 2018, realisasi indikator kinerja sasaran yang melampaui target Renstra adalah sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran, realisasi indikator kinerja sasaran yang di bawah target Renstra adalah sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran, sedangkan realisasi indikator kinerja sasaran yang sama dengan target Renstra adalah sebanyak 6 (enam) sasaran yang dijabarkan sebagaimana berikut :

➤ **MISI 1 : Membangun dan Mengembangkan BKD menjadi Lembaga yang Profesional**

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya standar pelayanan publik**

Sasaran strategis ini sampai dengan Tahun 2018 memperoleh realisasi kinerja sebesar 50 % atau lebih kecil dibandingkan dengan target pada Renstra, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 50 % pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pelayanan Pajak Daerah. Nilai IKM ini pada Tahun 2018 memperoleh kenaikan sebesar 0,05 menjadi 87,74 pada Tahun 2018. Namun untuk predikat mengalami penurunan menjadi B (Baik). Hal ini karena adanya perubahan peraturan terkait dengan skala nilai IKM.

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas manajemen BKD**

Indikator kinerja sasaran predikat SAKIP BKD memperoleh realisasi kinerja nilai B atau sama dari target Renstra dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 %. Hal ini karena SAKIP BKD yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja telah disusun dan diimplementasikan dengan cukup baik.

➤ **Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara Optimal**

**Sasaran Strategis 1 : Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan secara berkelanjutan**

Indikator kinerja pertama pada sasaran ini yaitu persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah. Target pada Renstra adalah 36,59 % dan capaiannya pada tahun 2018 adalah 36,06 % atau 98,55 %. Hal ini dapat diartikan bahwa realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja kedua pada sasaran ini ialah persentase rata-rata kenaikan pendapatan asli daerah (PAD). Target pada Renstra adalah 9,84 % dan capaiannya pada tahun 2018 adalah minus 12,42 % atau 79 %. Hal ini dapat diartikan bahwa realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja ketiga pada sasaran ini ialah persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan target pada tahun berjalan. Target pada Renstra adalah 100% dan capaiannya pada tahun 2018 adalah 105,25 % atau 105,25 %. Hal ini dapat diartikan bahwa realisasinya melampaui target yang telah ditetapkan.

Tidak tercapainya kedua target indikator kinerja di atas adalah karena terjadinya penurunan penerimaan yang cukup signifikan pada retribusi daerah yaitu sebesar 43,39 % dan Lain – lain PAD yang sah sebesar 43,41 % dibandingkan dengan tahun lalu.

### ➤ **Misi 3 : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel**

#### **Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan APBD**

Indikator kinerja sasaran alokasi anggaran belanja modal terhadap total belanja APBD, pada Tahun 2018 memperoleh realisasi kinerja sebesar 26,13 % atau lebih kecil dari target pada Renstra sebesar 39,50 % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 66,15 %.

#### **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya disiplin waktu penyusunan dan pelaksanaan APBD**

Indikator tersusunnya APBD secara tepat waktu, Pada Tahun 2018 memperoleh realisasi kinerja 100% atau sama dengan target pada Renstra Hal ini karena dokumen

Raperda APBD dan Raperda APBD Perubahan beserta penjabarannya disusun tepat waktu dan dokumen Perda nya disahkan tepat waktu.

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah**

Sasaran strategis ini sampai dengan Tahun 2018 memperoleh realisasi kinerja sebesar 100 % atau sama dengan target pada Renstra, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 %. Hal ini karena dari target indikator kinerja terlayannya pelayanan perbendaharaan sebanyak 38 Perangkat Daerah terealisasi sebanyak 38 Perangkat Daerah.

**Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Tata Kelola Aset**

Indikator kinerja pertama pada sasaran ini yaitu persentase aset tercatat. Target pada Renstra adalah 100% dan capaiannya pada tahun 2018 adalah 100%. Hal ini dapat diartikan bahwa semua aset yang ada tercatat dengan baik.

Indikator kinerja kedua pada sasaran ini ialah persentase bidang tanah pemerintah bersertifikat. Target pada Renstra adalah 8 % dan capaiannya pada tahun 2018 adalah 9,3 % atau 116,25 %. Hal ini dapat diartikan bahwa realisasinya melampaui target yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja ketiga pada sasaran ini ialah jumlah bidang yang dimanfaatkan. Target pada Renstra adalah 30 bidang dan capaiannya pada tahun 2018 adalah 60 bidang atau 200 %. Hal ini dapat diartikan bahwa realisasinya melampaui target yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja keempat pada sasaran ini ialah jumlah luas RTH yang diamankan per tahun. Target pada Renstra adalah 1,5 Hektar dan capaiannya pada tahun 2018 adalah 2,5 Hektar atau 166,67 %. Hal ini dapat diartikan bahwa realisasinya melampaui target yang telah ditetapkan.

**Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya disiplin waktu penyusunan laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan**

Indikator kinerja pertama pada sasaran ini yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Target pada Renstra adalah tepat waktu dan capaiannya pada tahun 2018 adalah tepat waktu atau 100%. Hal ini dapat diartikan bahwa laporan keuangan diserahkan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja kedua pada sasaran ini ialah opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kota Depok. Target pada Renstra adalah WTP dan capaiannya pada tahun 2018 adalah WTP atau 100%. Hal ini dapat diartikan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Depok mendapat opini terbaik.

#### **3.4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL**

Sasaran Strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah tidak ada yang berkaitan dengan standar nasional, sehingga tidak dilakukan proses perbandingan.

#### **3.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap realisasi kinerja sasaran strategis seperti yang tertuang dalam Formulir Pengukuran Kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan. Adapun evaluasi dan analisis akan hal tersebut adalah sebagai berikut :

➤ **MISI 1 : Membangun dan Mengembangkan BKD menjadi Lembaga yang Profesional**

##### **Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya standar pelayanan publik**

Sasaran strategis Meningkatnya standar pelayanan publik tidak mencapai target yaitu hanya memperoleh capaian kinerja sebesar 50 %.

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan pajak daerah	A	B	50	Target Tidak Tercapai

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, terdapat 9 parameter yang digunakan dalam pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat yaitu: (1) Persyaratan, (2) Prosedur, (3) Waktu Pelayanan, (4) Biaya / Tarif, (5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, (6) Kompetensi Pelaksana, (7) Perilaku Pelaksana, (8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, (9) Sarana dan Prasarana.

Berdasarkan hasil Laporan hasil Survey IKM terhadap pelayanan pembayaran pajak daerah dimana pada Tahun 2018 lokusnya adalah pajak BPHTB, didapatkan hasil bahwa Pelayanan pembayaran pajak memperoleh nilai 87,74 atau kategori B, yang berarti masuk ke dalam kategori kinerja pelayanan "Baik". Skor tertinggi ada pada unsur perilaku pelaksana dengan skor IKM 3,63. Dan Skor terendah ada pada unsur prosedur, waktu pelayanan dan sarana prasarana, semuanya dengan skor 3,45.

Walapun nilai IKM pelayanan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 0,05; dari **87,69** pada tahun 2017 menjadi **87,74** untuk Tahun 2018, namun untuk kategori mutu pelayanan mengalami penurunan dari A (Sangat Baik) menjadi B (Baik). Hal ini berarti bahwa sasaran strategis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan pajak daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan yang disebabkan karena adanya perubahan metodologi dasar penilaian yaitu :

**a. Dasar Peraturan.** Tahun 2017 penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, Sedangkan pada Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

## b. Skala Nilai IKM

Pada Tahun 2017, standar nilai IKM untuk predikat Mutu Pelayanan A (Sangat Baik) adalah 81,26 sampai dengan 100,00. Sedangkan pada Tahun 2018, standar nilainya naik menjadi 88,31 sampai dengan 100.

### **Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kualitas manajemen BKD**

Sasaran strategis meningkatnya kualitas manajemen BKD targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %.

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
Predikat SAKIP BKD	B	B	100 %	Target Tercapai

Indikator kinerja sasaran predikat SAKIP BKD memperoleh capaian 100%.

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja.

Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Tahun 2017 dari Inspektorat Daerah terhadap 5 (lima) komponen tersebut, Badan Keuangan Daerah memperoleh nilai sebesar 69,66 dengan kategori B (Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan).

Indikator kinerja ini dapat tercapai antara lain karena :

1. Dokumen Perencanaan Badan Keuangan Daerah yang meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja telah lengkap dan memenuhi hampir semua kriteria.
2. Telah dilakukan reviu terhadap dokumen Renstra secara berkala.
3. Telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal
4. Telah disusun mekanisme pengumpulan data kinerja, yakni SOP tentang pengumpulan data kinerja



5. Telah dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berkala
6. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) telah disusun sesuai dengan aturan yang berlaku
7. Telah dilakukan evaluasi internal secara berkala terhadap pencapaian kinerja
8. Pencapaian sasaran / kinerja Badan Keuangan Daerah hampir semuanya mencapai target dan lebih baik dari tahun sebelumnya

➤ **Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara Optimal**

**Sasaran Strategis : Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan secara berkelanjutan**

Sasaran strategis optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan secara berkelanjutan tidak mencapai target yaitu hanya memperoleh capaian kinerja sebesar 94,27 %.

Sasaran strategis ini didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	36,59 %	36,06 %	98,55 %	Target Tidak Terpenuhi
Persentase rata-rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9,84 %	-12,42 %	79 %	Target Tidak Terpenuhi
Persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target pada tahun berjalan	100 %	105,25 %	105,25 %	Target Terpenuhi

**1. Indikator kinerja Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah**

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dengan menghitung realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun 2018. Indikator kinerja ini memperoleh capaian sebesar 98,55 % karena Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah

tercapai 36,06 % dari target 36,10 %. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok Tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.060.318.260.118,68. Sedangkan realisasi Pendapatan Daerah Kota Depok adalah sebesar Rp 2.940.790.205.302,68

Pendapatan Daerah terdiri dari 3 sumber penerimaan pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kontribusi tertinggi terhadap Pendapatan Daerah pada Tahun 2018 diperoleh dari Dana Perimbangan 39,28 % atau Rp 1.155.090.53500, selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 36,06 % atau Rp 1.060.318.260,00 dan yang terakhir adalah Lain – lain Pendapatan Yang Sah sebesar 24,67 % atau Rp 725.381.409.388,00.

Kecilnya proporsi PAD terhadap pendapatan daerah disebabkan antara lain karena diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana Retribusi daerah tidak lagi menjadi beban dalam target pendapatan. Hal ini berdampak pada pendapatan dari retribusi daerah menjadi turun secara signifikan.

-

## 2. Indikator Kinerja Persentase Rata – rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dengan menghitung tingkat kenaikan realisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2018 dibandingkan dengan Tahun 2017. Indikator kinerja ini memperoleh capaian sebesar 79 % karena realisasi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok Tahun 2018 dibandingkan dengan Tahun 2017 tercapai sebesar minus 12,42 % dari target 9,84 %. Pada Tahun 2017 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar Rp 1.210.748.605.561,14 dan pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.060.318.260.118,68.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 sumber penerimaan yaitu dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain lain Pendapatan Asli yang Sah. Pada Tahun 2017, penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp 1.210.748.605.561,14 tercapai 112,29 % dari target Rp 1.078.263.821.180,92 dengan rincian dari Pajak Daerah sebesar Rp 841.743.994.169,00 (114,55 %) dari target Rp 734.844.351.531,87; dari

Retribusi Daerah sebesar Rp 63.594.629.696,00 (113,66 %) dari target Rp 55.951.810.462,00; dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 7.972.795.152,00 (61,01 %) dari target Rp 13.068.642.020,05 serta dari Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah sebesar Rp 297.437.186.544,14 (108,40 %) dari target 274.399.017.167,00.

Sedangkan pada Tahun 2018, penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp 1.060.318.260.118,68 tercapai 105,25 % dari target Rp 1.007.434.833.378,00 dengan rincian dari Pajak Daerah sebesar Rp 843.324.072.480,00 (105,68 %) dari target Rp 798.022.506.200; dari Retribusi Daerah sebesar Rp 36.001.082.767,00 (102,16 %) dari target Rp 35.240.937.829,00; dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 12.681.414.156,00 (99,81 %) dari target Rp 12.706.164.320,00 serta dari Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah sebesar Rp 168.311.690.715,68 (104,24 %) dari target Rp 161.465.225.029,00.

Dari uraian realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 dan 2018 di atas, dapat diketahui bahwa penurunan terbesar berasal dari sektor Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu sebesar 43,41 %, disusul dari Retribusi Daerah sebesar 43,39 %. Sedangkan dari Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 0,19 % dan selanjutnya dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 59,06 %

Penurunan Retribusi Daerah antara lain karena terbitnya kebijakan pemerintah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan Permendagri ini menyebabkan retribusi IMB dan HO tidak lagi menjadi beban dalam target pendapatan. Dampak dari kebijakan ini adalah pendapatan retribusi yang pada Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp 63.594.629.696,00, pada Tahun 2018 turun menjadi Rp 36,001,082.767,00 atau 43,39 %.

Selanjutnya dari Pajak Daerah kenaikannya tidak cukup signifikan yang disebabkan penerimaan pajak daerah BPHTB tidak mencapai target. Padahal BPHTB merupakan target yang paling besar dari pajak daerah. Hal ini karena, berdasarkan data dari Real Estate Indonesia (REI), pada Tahun 2018 penjualan

properti relatif stagnan (berhenti) di semua kelas. Khusus sektor rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada Tahun 2018 tercatat 150 ribu unit, sementara Tahun 2017 tercatat 212 ribu unit. Untuk penjualan properti di atas 5 (lima) milyar, diperkirakan juga mengalami penundaan pembelian dimana salah satu sebabnya adalah pada Tahun 2019 direncanakan akan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Pajak Penghasilan (PPH 22) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Disamping itu juga karena diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pada Pasal 33 peraturan dimaksud diatur bahwa :

- Dalam semua hal penerima sertifikat Hak Atas Tanah tidak atau belum mampu membayar BPHTB dan / atau masih adanya tunggalkan pembayaran PPh oleh pihak lain atas tanah yang bersangkutan maka tetap dapat diterbitkan sertifikat Hak Atas Tanah.
- Dalam hal peserta PTSL tidak atau belum mampu membayar BPHTB maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan BPHTB terhutang.

### **3. Indikator Kinerja Persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target pada tahun berjalan**

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dengan menghitung realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target pada tahun berjalan. Indikator kinerja ini memperoleh capaian sebesar 105,25 % karena realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target pada tahun berjalan pada Tahun 2018 tercapai sebesar 105,25 % dari target 100 %. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok Tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.060.318.260.118,68 dari target sebesar Rp 1.007.424.833.378,00.

Hal ini karena telah dilakukan berbagai upaya diantaranya :

1. Terkait dengan pajak daerah, telah dilakukan evaluasi capaian penerimaan pajak daerah secara berkala terhadap target, melakukan penagihan terhadap WP yang menunggak, melakukan verifikasi lapangan secara lebih intensif,

mengirimkan sms sosialisasi wajib pajak untuk mengingatkan WP agar taat membayar pajak tepat pada waktunya, mengadakan WP Gathering serta pemberian penghargaan kepada WP.

2. Terkait dengan retribusi daerah, telah dilakukan koordinasi dengan OPD penghasil retribusi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah seperti balai rakyat.

➤ **Misi 3 : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel**

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Efektifitas dalam Pengelolaan APBD**

Sasaran strategis meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan APBD tidak mencapai target yaitu hanya memperoleh capaian kinerja sebesar 66,15 %.

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Interpretasi</b>
Alokasi anggaran belanja modal terhadap total belanja APBD	39,5 %	26,13 %	66,15 %	Target Tidak Tercapai

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dengan menghitung proporsi alokasi anggaran belanja modal dibandingkan dengan total anggaran belanja APBD Kota Depok. Alokasi anggaran untuk belanja modal pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp 920.788.038.615,00,00. Sedangkan total anggaran belanja APBD Kota Depok pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp 3.523.746.275.418,88 sehingga persentase anggaran belnaja modal terhadap total belanja APBD adalah sebesar 66,15 %.

Sasaran strategis ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena :

1. Adanya penambahan anggaran DAK BOP PAUD pada belanja hibah dan tambahan penghasilan guru pada belanja gaji dan tunjangan
2. Adanya penambahan anggaran kegiatan DAK Non Fisik

Penambahan anggaran tersebut memperbesar proporsi belanja barang dan jasa serta belanja tidak langsung, sementara besaran belanja modal tidak mengalami perubahan.

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Disiplin Waktu Penyusunan dan Pelaksanaan APBD**

Sasaran strategis optimalnya meningkatnya disiplin waktu penyusunan dan pelaksanaan APBD targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %.

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
Tersusunnya APBD secara tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100 %	Target Tercapai

Sasaran strategis ini memperoleh capaian 100 % karena APBD Kota Depok Tahun 2017 dapat disusun tepat waktu dan disahkan pada tanggal 28 Desember 2017. Hal ini tercapai karena adanya komitmen dan koordinasi yang baik dari pihak eksekutif yaitu TAPD dan seluruh perangkat daerah dengan pihak legislatif untuk mentaati jadwal penyusunan APBD.

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah**

Sasaran strategis meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %.

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
Terlayannya pelayanan perbendaharaan	100 %	100 %	100 %	Target Tercapai

Sasaran strategis ini memperoleh capaian 100 % karena semua perangkat daerah telah terlayani dalam pelayanan perbendaharaan mulai dari proses penerbitan Surat Persediaan Dana (SPD) sampai dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) maupun dalam rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah diantara perangkat daerah penghasil.

#### **Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Tata Kelola Aset**

Sasaran strategis meningkatnya tata kelola aset targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 145,73 %.

Sasaran strategis ini didukung oleh 4 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Interpretasi</b>
Persentase Aset tercatat	100 %	100 %	100 %	Target Tercapai
Persentase bidang tanah pemerintah bersertifikat	8 %	9,3 %	116,25 %	Target Tercapai
Jumlah bidang yang dimanfaatkan	30 Bidang	60 Bidang	200 %	Target Tercapai
Jumlah luas RTH yang diamankan per tahun	1,5 Ha	2,5 Ha	166,67 %	Target Tercapai

#### **1. Indikator kinerja Persentase Aset Tercatat**

Indikator kinerja ini memperoleh capaian sebesar 100 % karena semua aset milik pemerintah Kota Depok sudah tercatat

#### **2. Indikator kinerja Persentase Bidang Tanah Pemerintah Bersertifikat**

Indikator kinerja ini memperoleh capaian sebesar 116,25 % karena persentase bidang tanah pemerintah bersertifikat terealisasi sebesar 9,3 % dari target 8 %. Sampai dengan Tahun 2018, jumlah total bidang tanah milik Pemerintah Kota Depok adalah 3.635 bidang. Sedangkan jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat adalah sebanyak 338 bidang.

Hal ini dapat tercapai karena adanya koordinasi yang terus menerus antara Pemerintah Kota Depok dengan BPN.

#### **3. Indikator Kinerja Jumlah Bidang yang Dimanfaatkan**

Indikator kinerja ini memperoleh capaian sebesar 200 % karena jumlah bidang yang dimanfaatkan terealisasi sebesar 60 bidang dari target 30 bidang. Hal ini karena banyaknya penambahan untuk pemanfaatan posyandu, dimana

posyandu penerima bantuan yang memakai lahan fasos fasum harus mendapatkan ijin pemanfaatan penggunaan lahan tersebut dari Pemerintah Kota Depok

#### 4. Indikator Kinerja Jumlah Luas RTH yang Diamankan Per Tahun

Indikator kinerja ini memperoleh capaian sebesar 166,67 % karena jumlah luas RTH yang diamankan per tahun terealisasi sebesar 2,5 Ha dari target 1,5 Ha. Pengamanan Ruang terbuka hijau dilakukan dengan pemasangan plang papan nama aset dan patok batas tanah di berbagai lokasi, diantaranya TPU Pasir Putih, Permata Cimanggis dan Cinere Residence.

#### **Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Disiplin Waktu Penyusunan Laporan Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan**

Sasaran strategis meningkatnya disiplin waktu penyusunan laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %.

Sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100 %	Target Tercapai
Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kota Depok	WTP	WTP	100 %	Target Tercapai

##### 1. Indikator kinerja Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Indikator kinerja ini memperoleh capaian 100 % karena Laporan Keuangan Kota Depok Tahun 2017 telah disampaikan tepat waktu sebelum batas waktu akhir penyampaian yaitu Tanggal 31 Maret 2018.

##### 2. Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok

Indikator kinerja ini memperoleh capaian 100 % karena Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2017 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.



Penilaian terhadap Laporan Keuangan tersebut meliputi 3 (tiga) aspek yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas dalam pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang – undangan. Pemerintah Kota Depok dinilai telah dapat menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan kriteria di atas.

### 3.6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas penggunaan sumber daya pada Badan Keuangan Daerah selama Tahun 2018 untuk masing masing sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

- **MISI 1 : Membangun dan Mengembangkan BKD menjadi Lembaga yang Profesional**

#### **Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya standar pelayanan publik**

Sasaran Strategis Meningkatnya standar pelayanan publik didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1. Program Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	1.707.084.000,00	1.839.802.642,00	1.491.343.100,00	81,06	348.459.542,00
2. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	841.150.000,00	841.150.000,00	671.200.318,00	79,80	169.949.682,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.548.234.000,00</b>	<b>2.680.952.642,00</b>	<b>2.162.543.418,00</b>	<b>80,66</b>	<b>518.409.224,00</b>

Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 2.680.952.642,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.162.543.418,00 dan sisa anggaran sebesar Rp 518.409.224,00. Namun mengingat capaian kinerja sasaran ini tidak mencapai target, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis ini.

#### **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas manajemen BKD**

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas manajemen BKD didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	2.149.500.000,00	2.249.491.500,00	2.058.785.188,00	91,52	190.706.312,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	675.500.000,00	794.500.000,00	694.328.435,00	87,39	100.171.565,00
3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80.000.000,00	80.000.000,00	71.684.600,00	89,61	8.315.400,00
4. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	39.000.000,00	172.390.000,00	167.991.400,00	97,45	4.398.600,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.944.000.000,00</b>	<b>3.296.381.500,00</b>	<b>2.992.789.623,00</b>	<b>90,79</b>	<b>303.591.877,00</b>

Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 3.296.381.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.992.789.623,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 303.591.877,00.

➤ **Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara Optimal**

**Sasaran Strategis 1 : Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan secara berkelanjutan**

Sasaran strategis Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan secara berkelanjutan didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1. Program Peningkatan Penerimaan PAD	2.432.000.000,00	2.220.400.000,00	1.794.010.500,00	80,80	426.389.500,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.432.000.000,00</b>	<b>2.220.400.000,00</b>	<b>1.794.010.500,00</b>	<b>80,80</b>	<b>426.389.500,00</b>

Sasaran strategis ini targetnya tidak tercapai yaitu hanya memperoleh capaian kinerja sebesar 94,27 %. Alokasi anggaran untuk sasaran ini adalah sebesar Rp 2.220.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.794.010.500,00 dan sisa anggaran sebesar Rp 426.389.500,00. Namun mengingat capaian kinerja sasaran ini tidak

mencapai target, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis ini.

➤ **Misi 3 : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel**

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan APBD**

Sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas dalam Pengelolaan APBD didukung oleh Program / Kegiatan dan Anggaran sebagai berikut :

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah					
Kegiatan :					
a. Penelitian RKA OPD dan RKA-P OPD	200.000.000,00	200.000.000,00	120.976.000,00	60,49	79.024.000,00
b. Penelitian DPA OPD dan DPPA OPD	150.000.000,00	150.000.000,00	99.399.000,00	66,27	50.601.000,00
c. Penyusunan KUA/ PPAS dan KUPA/ PPAS Perubahan	250.000.000,00	250.000.000,00	215.865.340,00	86,35	34.134.660,00
<b>JUMLAH</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>436.240.340,00</b>	<b>72,71</b>	<b>163.759.660,00</b>

Sasaran strategis ini targetnya tidak tercapai yaitu hanya memperoleh capaian kinerja sebesar 66,15 %. Alokasi anggaran untuk sasaran ini adalah sebesar Rp 600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 436.240.340,00 dan sisa anggaran sebesar Rp 163.759.660,00. Namun mengingat capaian kinerja sasaran ini tidak mencapai target, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis ini.

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya disiplin waktu penyusunan dan pelaksanaan APBD**

Sasaran strategis Meningkatnya Disiplin Waktu Penyusunan dan Pelaksanaan APBD didukung oleh Program / Kegiatan dan Anggaran sebagai berikut :

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah					
Kegiatan :					
a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD	350.000.000,00	350.000.000,00	291.888.488,00	83,40	58.111.512,00
<b>JUMLAH</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>291.888.488,00</b>	<b>83,40</b>	<b>58.111.512,00</b>

Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 350.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 291.888.488,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 58.111.512,00.

### **Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah**

Sasaran strategis Meningkatkan Profesionalitas, Transparansi dan Akuntabilitas Penatausahaan Keuangan Daerah didukung oleh Program / Kegiatan dan Anggaran sebagai berikut :

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah					
Kegiatan :					
a. Penerbitan SP2D se-Kota Depok	120.000.000,00	120.000.000,00	102.144.000,00	85,12	17.856.000,00
b. Penatausahaan penerimaan dan Pengelolaan Kas Daerah	140.750.000,00	202.750.000,00	113.091.000,00	55,78	89.659.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>260.750.000,00</b>	<b>322.750.000,00</b>	<b>215.235.000,00</b>	<b>66,69</b>	<b>107.515.000,00</b>

Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 322.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 215.235.000,00 Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 107.515.000,00.

#### **Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Tata Kelola Aset**

Sasaran strategis Meningkatnya Tata Kelola Aset didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	897.360.000,00	907.760.000,00	751.658.333,00	82,80	156.101.667,00
2. Pengamanan dan Penertiban Aset RTH	485.180.000,00	485.180.000,00	479.080.000,00	98,74	6.100.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.382.540.000,00</b>	<b>1.392.940.000,00</b>	<b>1.230.738.333,00</b>	<b>88,36</b>	<b>162.201.667,00</b>

Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 145,73 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 1.392.940.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.230.738.333,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 162.201.667,00.

#### **Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya disiplin waktu penyusunan laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan**

Sasaran strategis Meningkatnya disiplin waktu penyusunan laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan didukung oleh Program / Kegiatan dan Anggaran sebagai berikut :

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah					
Kegiatan :					
a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok	55.000.000,00	48.280.000,00	41.479.000,00	85,91	6.801.000,00
b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	300.000.000,00	300.000.000,00	232.277.000,00	77,43	67.723.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>355.000.000,00</b>	<b>348.280.000,00</b>	<b>273.756.000,00</b>	<b>78,60</b>	<b>74.524.000,00</b>

Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 348.280.000,00

dengan realisasi sebesar Rp 273.756.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 74.524.000,00.

### **3.7. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, Badan Keuangan Daerah telah menetapkan 8 sasaran strategis. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis tersebut didapatkan bahwa 4 (empat) sasaran tercapai dengan memperoleh capaian kinerja 100 % dan 1 (satu) sasaran memperoleh capaian kinerja di atas 100 %, sedangkan 3 (tiga) sasaran yang lain memperoleh capaian kinerja di bawah 100 % atau tidak mencapai target.

Analisis terhadap program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- **Misi 1 : Membangun dan Mengembangkan BKD menjadi Lembaga yang Profesional**

#### **Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan standar pelayanan publik**

Pencapaian kinerja sasaran strategis ini ditunjang oleh Program Pengembangan Layanan Teknologi Informatika dan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan :

- a. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD); dimana telah dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan SIPKD serta Pengembangan SIPKD dalam rangka penerapan e – budgeting.
- b. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PBB dan BPHTB; dimana telah dilakukan pemeliharaan sarana prasarana dan pemeliharaan atas aplikasi yang telah dibangun pada tahun sebelumnya serta pengembangan sistem PBB BHTB untuk:
  - Pengembangan Aplikasi SISMIOP BPHTB
  - Pengembangan Website PBB dan BPHTB

- Pengembangan Aplikasi Android Pelayanan PBB dan BPHTB
- Pengembangan Aplikasi Android Distribusi SPPT PBB
- c. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen PAD; dimana telah dilakukan pemeliharaan sarana prasarana dan pemeliharaan atas aplikasi yang telah dibangun pada tahun sebelumnya serta pengembangan SIMPAD untuk:
  - Pengembangan Aplikasi PDL Mobile
  - Pengembangan Aplikasi Tax Register (T-Reg) Online
- d. Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD Modul Aset sehingga semua aset Pemerintah Kota Depok telah terdata.
- e. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pendataan Fasos / Fasum sehingga data fasos fasum di seluruh Kota Depok dapat lebih tertata dan terinventarisir dengan baik.
- f. Sinergitas SIMGAJI dan SIMPEG, dimana telah dilakukan pengembangan Aplikasi SIMGAJI yang terkoneksi langsung dengan Aplikasi SIMPEG pada BKPSDM sehingga data perubahan terkait dengan gaji pegawai dapat lebih akurat.
- g. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan, dimana telah dilakukan peningkatan kapasitas Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran dan dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan.
- h. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan, dimana telah dilakukan peningkatan kapasitas Kasubag Keuangan dan Penyusun Laporan Keuangan dalam menyusun laporan keuangan.
- i. Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran, dimana telah dilakukan peningkatan kapasitas Kasubag PEP dan Pelaksana pengelola perencanaan pada perangkat daerah dalam menyusun anggaran.
- j. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana telah dilakukan peningkatan kapasitas Pengurus dan Penyimpan Barang pada perangkat daerah dalam mengelola barang milik daerah.

### **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas manajemen BKD**

Pencapaian kinerja sasaran strategis ini didukung oleh program:

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran, melalui kegiatan :

- 
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Makanan dan Minuman
  - Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, melalui kegiatan :
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Bermotor
  - Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, melalui kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja
- d. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan melalui kegiatan
- Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja
  - Kajian Penyelenggaraan Pajak Daerah (Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah)

➤ **Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara Optimal**

**Sasaran Strategis 1 : Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan secara berkelanjutan**

Pencapaian kinerja sasaran strategis ini didukung oleh program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan :

- a. Pelayanan Penerimaan PBB dan BPHTB; dimana telah dilakukan verifikasi lapangan PBB dan BPHTB, sosialisasi PBB BPHTB melalui media spanduk dan stiker, updating data objek pajak potensial dan khusus serta pemutakhiran objek PBB perumahan / komplek / cluster di 63 kelurahan di Kota Depok.
- b. Pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak Daerah; dimana sebuah penghargaan diberikan kepada WP terbaik dalam ketaatan pembayaran pajak, RW dan RT pembina warga terbaik untuk pembayaran PBB, PPAT dengan transaksi terbanyak serta penghargaan untuk kelurahan terbaik dalam sosialisasi PBB.



- c. Penagihan PBB dan BPHTB; dimana telah dilakukan upaya penagihan secara langsung maupun melalui pengiriman surat kepada wajib pajak yang menunggak serta pelayanan PBB Off Line.
- d. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah; dimana telah dilakukan sosialisasi wajib pajak, pemeriksaan wajib pajak dan uji petik ketaatan wajib pajak.
- e. Penagihan Pajak Daerah di Luar PBB dan BPHTB; dimana telah dilaksanakan upaya penagihan secara langsung maupun melalui pengiriman surat kepada wajib pajak yang menunggak.

➤ **Misi 3 : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel**

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan APBD**

Pencapaian kinerja sasaran strategis ini didukung program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui kegiatan:

- a. Penyusunan KUA – PPAS dan KUPA/ PPAS Perubahan
- b. Penelitian RKA OPD dan RKA-P OPD
- c. Penelitian DPA OPD dan DPPA OPD

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Disiplin Waktu Penyusunan dan Pelaksanaan APBD**

Pencapaian kinerja sasaran strategis ini ditunjang oleh program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui kegiatan :

- a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD

**Sasaran Strategis 3: Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah**

Pencapaian kinerja sasaran strategis ini ditunjang oleh program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui kegiatan :

1. Penerbitan SP2D se - Kota Depok; dimana telah dilakukan dokumentasi SP2D seluruh OPD dengan buku registrasi penerbitan SP2D, buku penerbitan rekapan SP2D dan register penerbitan rekapan SP2D untuk menunjang terwujudnya akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah.
2. Penatausahaan penerimaan dan Pengelolaan Kas Daerah

#### **Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Tata Kelola Aset**

Pencapaian kinerja sasaran strategis ini ditunjang oleh Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah dan Program Pengamanan dan Penertiban Aset RTH melalui kegiatan :

- a. Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah; dimana telah dilakukan pengelolaan administrasi pemanfaatan dan penghapusan aset Kota Depok serta Penyusunan Naskah Akademis Revisi Perda Kekayaan Daerah.
- b. Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan; dimana telah dilakukan verifikasi terhadap prasarana, sarana utilitas perumahan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Depok.
- c. Sertifikasi Aset Tanah; dimana telah dilaksanakan pengukuran dan pensertifikatan bidang tanah milik Pemerintah Kota Depok.
- d. Sinkronisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah; dimana telah dilaksanakan penyusunan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sosialisasi pengelolaan barang milik daerah kepada pengguna barang pada perangkat daerah serta sinkronisasi barang milik daerah di seluruh perangkat daerah untuk selanjutnya dilakukan pencatatan aset dengan buku induk inventaris barang, kartu inventaris ruangan dan kartu inventaris barang oleh seluruh perangkat daerah.
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah; dimana telah dilakukan pemeliharaan Balai Rakyat di 4 lokasi yaitu Balai Rakyat Depok Utara, Balai Rakyat Depok I, Balai Rakyat Depok II, dan Balai Rakyat Mekarsari.
- f. Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota Depok; dimana telah dilaksanakan pengamanan aset melalui pemasangan patok batas tanah dan plang papan nama aset.

---

**Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya disiplin waktu penyusunan laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan**

Pencapaian kinerja sasaran strategis ini ditunjang oleh program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui kegiatan:

- a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester Kota Depok; dimana telah dilakukan penyusunan laporan keuangan Kota Depok untuk semester 1.
- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dimana telah dilaksanakan penyusunan laporan keuangan Kota Depok yang transparan dan akuntabel serta tepat waktu sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

**B. REALISASI ANGGARAN**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, alokasi anggaran belanja Badan Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 74.385.519.862,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 63.512.995.862,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 10.872.524.000,00 yang tersebar di 40 kegiatan. Berdasarkan perkembangan kebutuhan pada tahun berjalan dan dengan tidak merubah sasaran strategis, indikator kinerja beserta target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra BKD, maka pada Perubahan APBD 2018 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2018, anggaran belanja Badan Keuangan Daerah bertambah menjadi sebesar Rp 74.794.877.833,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 63.583.173.691,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 11.211.704.142,00 yang tersebar di 40 kegiatan.

Realisasi dari anggaran belanja yang tersedia adalah sebesar Rp 52.237.662.220,00 (69,84 %) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 42.840.460.518,00 (67,38 %) dan Belanja Langsung senilai Rp 9.397.201.702,00 (83,82 %).

Rincian anggaran dan realisasi belanja langsung untuk masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN		ANGGARAN (Rp)		REALISASI	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
<b>MISI 1 : Membangun dan Mengembangkan BKD Menjadi Lembaga Yang Profesional</b>						
1	Meningkatnya standar pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan pajak daerah	1.896.815.000,00	2.361.940.000,00	1.899.517.250,00	80,42
2	Meningkatnya kualitas manajemen BKD	Predikat SAKIP BKD	3.106.809.800,00	3.531.509.800,00	3.163.634.640,00	89,58
<b>MISI 2 : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara Optimal</b>						
1	Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan secara berkelanjutan	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Persentase rata-rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target pada tahun berjalan	2.161.751.400,00	2.288.681.400,00	1.796.357.804,00	78,49
<b>MISI 3 : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Akuntabel</b>						
1	Meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan APBD	Alokasi anggaran belanja modal terhadap total belanja APBD	690.000.000,00	690.000.000,00	518.146.128,00	75,09
2	Meningkatnya disiplin waktu penyusunan dan pelaksanaan APBD	Tersusunnya APBD secara tepat waktu	390.000.000,00	390.000.000,00	352.173.000,00	90,30
3	Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah	Terlayannya pelayanan perbendaharaan	346.960.000,00	274.960.000,00	185.304.025,00	67,39
4	Meningkatnya tata kelola aset	Persentase aset tercatat Persentase bidang tanah pemerintah bersertifikat Jumlah bidang yang dimanfaatkan Jumlah luas RTH yang diamankan per tahun	1.090.178.000,00	1.111.828.000,00	827.943.908,00	74,47
5	Meningkatnya disiplin waktu penyusunan laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Opini BPK atas laporan keuangan	339.389.000,00	339.389.000,00	252.478.650,00	74,39
<b>TOTAL</b>			<b>10.121.903.200,00</b>	<b>11.088.308.200,00</b>	<b>9.068.635.405,00</b>	<b>81,79</b>

Dari 40 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 tersebut, 39 kegiatan realisasi fisiknya tercapai 100 %. Dan terdapat 1 (satu) kegiatan yang realisasi fisiknya tidak mencapai 100 % yaitu :

Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD Modul Aset sebesar 25,00 %. Hal ini karena integrasi kode barang sesuai dengan Permendagri 108 belum sempurna sehingga belanja konsultan tidak terserap.

Adapun untuk target pendapatan yang dikelola langsung oleh Badan Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 849.904.982.059 dengan realisasi sebesar Rp. 920.733.590.961,69 (108,53 %). Realisasi pendapatan yang tidak mencapai target berasal dari Retribusi Daerah yaitu sebesar 85,85 % serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 99,81 %.

Selain itu, Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yaitu :

1. Mengelola pendapatan yang diperoleh dari :
  - a. Dana Perimbangan
    - Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
    - Dana Alokasi Umum (DAU)
    - Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - b. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah
    - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
    - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
    - Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
2. Mengelola Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
3. Mengelola Pembiayaan